

Judul : Stok energi hanya 21 hari, Legislator ingatkan pasokan BBM mudik
Tanggal : Kamis, 05 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Stok Energi Hanya 21 Hari

Legislator Ingatkan Pasokan BBM Mudik

ANGGOTA Komisi XII DPR Ratna Juwita Sari meminta ada langkah konkret untuk mengatasi kekhawatiran kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) menjelang arus mudik lebaran. Hal ini menyusul pengakuan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut cadangan energi nasional saat ini hanya mampu bertahan selama 21 hari.

Dia bilang, pernyataan Menteri ESDM soal cadangan energi nasional tidak boleh dipandang sebelah mata. Mengingat mobilitas masyarakat akan mencapai puncaknya dalam waktu dekat, sehingga ketahanan stok dan kelancaran distribusi BBM menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.

Dia mengingatkan, jangan sampai secara nasional terlihat aman, tetapi di lapangan terjadi kelangkaan karena distribusi tidak optimal. Karena mudik akan mendorong konsumsi BBM secara signifikan. "Pemerintah harus menjamin tidak ada kendala pasokan," tegas Ratna di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Dia menyoroti risiko lonjakan permintaan pada komoditas vital

seperti BBM, Liquefied Petroleum Gas (LPG), hingga avtur. Tanpa antisipasi matang, ketimpangan antara stok pusat dan ketersediaan di daerah dapat memicu keresahan sosial, mulai dari antrian panjang di SPBU hingga kelangkaan gas melon. "Gangguan pada sektor ini akan memberikan efek domino yang merusak stabilitas ekonomi nasional," ucapnya.

Ratna menegaskan, ketahanan energi adalah bagian dari ketahanan nasional. Momentum mudik tidak boleh terganggu hanya karena persoalan pasokan. "Pemerintah harus hadir memberi kepastian dan rasa aman," tandasnya.

Berdasarkan data dari Reformasi Syndicate, kebutuhan BBM nasional mencapai 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari. Angka ini berbanding terbalik dengan realitas produksi minyak mentah dalam negeri yang hanya menyentuh kisaran 500 ribu hingga 600 ribu barel per hari. Defisit ini membuat posisi Indonesia sangat bergantung pada impor dan ketersediaan cadangan strategis.

Dengan itu, Ratna meminta adanya transparansi Pemerintah dalam mengelola sisa cadangan



Ratna Juwita

21 hari tersebut agar tidak menjadi sekadar peringatan tanpa tindak lanjut. Karena masyarakat membutuhkan langkah cepat, terukur, dan transparan. "Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak," tegas legislator asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur (Jatim) ini.

Senada, anggota Komisi XII DPR Dewi Yustisiana meminta PT Pertamina mengantisipasi dampak eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel terhadap stabilitas pasokan energi nasional, khususnya minyak

mentah dan LPG. Karena ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah (Timteng) berpotensi mengganggu rantai pasok energi global.

Terlebih kawasan tersebut merupakan salah satu pusat produksi minyak dunia dan jalur distribusi strategis. Sehingga gangguan terhadap produksi maupun pelayaran dapat memicu volatilitas harga minyak mentah dan LPG. "Sementara Indonesia masih memiliki ketergantungan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," jelas Dewi.

Indonesia, lanjutnya, harus memastikan langkah antisipatif dilakukan sejak dini agar pasokan dalam negeri tetap aman dan harga tidak bergejolak, terutama untuk kebutuhan masyarakat. Begitu juga dengan mekanisme pembelian minyak mentah oleh Pertamina, termasuk dari Saudi Aramco, harus dilakukan melalui skema business to business (B to B).

Dengan skema tersebut, kontrak bersifat komersial antar korporasi, sehingga manajemen risiko, fleksibilitas pasokan, serta pengaturan jadwal pengiriman menjadi aspek krusial

dalam menghadapi dinamika geopolitik. Selain itu, Dewi mendorong Pertamina memperkuat diversifikasi sumber pasokan, menjaga kecukupan cadangan operasional minyak dan LPG, dan memastikan distribusi berjalan lancar.

Komisi XII DPR kata Dewi akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan kesiapan dan respons cepat dalam menjaga ketahanan energi nasional. "Situasi global ini menjadi pengingat ketahanan energi harus diperkuat melalui tata kelola yang adaptif, diversifikasi pasokan, dan peningkatan kapasitas dalam negeri," kata politikus Golkar ini.

Sementara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, durasi penyimpanan energi Indonesia saat ini berada di kisaran 25-26 hari, dengan standar minimum nasional sebesar 21 hari. Memang secara faktanya ketahanan energi kita, storage itu maksimal di angka 25-26 hari, enggak lebih dari itu," ujar Bahlil di Jakarta, Rabu (4/3/2026). ■ TIF